

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR 2011



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
2012**



**Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH
Wakil Wali Kota Blitar, H. Purnawan Buchori**



DAFTAR ISI

Cover depan	1
Daftar Isi	2
Pengantar Wali Kota Blitar	3
I. PENDAHULUAN	4
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	8
III. URUSAN DESENTRALISASI	10
IV. PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS PEMBANTUAN	23
V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	25
VI. PENUTUP	31
Cover Belakang	32

Suplemen Buletin Cakrawala

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Blitar Tahun 2011

Isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata sehingga sampai dengan hari ini kita sekalian masih mampu melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan mengakhiriinya dengan menyusun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Blitar.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar akhir tahun anggaran 2011, disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pada materi ILPPD Kota Blitar Tahun 2011 berisikan laporan berupa uraian dan data baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif atas penyelenggaraan program dan kegiatan selama waktu satu tahun dengan kerangka perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2011.

Sudah banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Blitar, tetapi juga masih ada beberapa capaian penyelenggaraan yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga belum sepenuhnya aspirasi warga Kota Blitar yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan tantangan lain pembangunan Kota yang belum terselesaikan.

Pada tahun 2011 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 yang telah disusun pada tahun 2010, sehingga pada tahun 2011 juga mulai dilaksanakannya berbagai program sesuai Visi dan Misi Kota Blitar 2010-2015, dengan Visi : **“MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015”**.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini saya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan ILPPD Kota Blitar Tahun 2011, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar selama tahun 2011, bahan evaluasi, informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota selama tahun 2011 serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

WALI KOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH



Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Blitar Akhir Tahun Anggaran 2011

I. PENDAHULUAN

Sebagai wujud komitmen dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan, maka pembangunan dilaksanakan dengan mekanisme tahapan dan melalui pola yang berkelanjutan. Serangkaian upaya menuju kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan pada tahun sebelum penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015, merupakan pondasi untuk meletakkan pijakan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2011 di Kota Blitar. Tahun 2011 merupakan tahun awal atau tahun dasar yang sesungguhnya dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD 2011-2015.

Sebagai awal tahun RPJMD, maka pada tahun 2011 merupakan era baru penerapan visi misi kepala daerah periode tahun 2010-2015. Dengan visi : “**MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015**”. maka RPJMD Kota Blitar 2011 - 2015, secara nyata menjadi sumber inspirasi dan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Blitar.

Sebagaimana tahun sebelumnya, kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang secara substantif memiliki prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Oleh karena itu sebagai awal tahun penyelenggaraan RPJMD 2011-2015 penekanan pembangunan masih tetap dititikberatkan pada aspek aspek mikro yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemantapan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian pembangunan pada tahun sebelumnya yang secara makro telah menunjukan angka-angka statistik yang cukup baik dan terus mengalami peningkatan dapat dijadikan dasar pijakan untuk pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.

Berangkat dari beberapa pernyataan di depan maka dalam rangka pencapaian visi Kota Blitar Tahun 2015 ditetapkan Misi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata ;
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan,;
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.



A. DASAR HUKUM

Pemerintah Kota Blitar berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan daerah. Dasar penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2011 ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015.

B. GAMBARAN UMUM KOTA BLITAR

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Blitar terletak + 160 Km sebelah Barat Daya Kota Surabaya dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ - $8^{\circ}8'$ Lintang Selatan, adapun Kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Nglegok dan Garum
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Kanigoro
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Nglegok
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Kanigoro dan Garum

Secara administratif, Kota Blitar mempunyai luas yang hanya $32,58 \text{ Km}^2$, terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan masing-masing Kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) Kelurahan, adapun Luas masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

1). Kecamatan Sananwetan	$12,1516 \text{ Km}^2$
a). Kelurahan Rembang	$0,8443 \text{ Km}^2$
b). Kelurahan Klampok	$1,5307 \text{ Km}^2$
c). Kelurahan Plosokerep	$1,2481 \text{ Km}^2$
d). Kelurahan Karangtengah	$1,7954 \text{ Km}^2$
e). Kelurahan Sananwetan	$2,1279 \text{ Km}^2$
f). Kelurahan Bendogerit	$1,9552 \text{ Km}^2$
g). Kelurahan Gedog	$2,6500 \text{ Km}^2$
2). Kecamatan Kepanjenkidul	$10,5023 \text{ Km}^2$
a). Kelurahan Kepanjenkidul	$0,8670 \text{ Km}^2$
b). Kelurahan Kepanjenlor	$0,6133 \text{ Km}^2$
c). Kelurahan Kauman	$0,6803 \text{ Km}^2$
d). Kelurahan Bendo	$1,5185 \text{ Km}^2$
e). Kelurahan Tanggung	$2,2300 \text{ Km}^2$
f). Kelurahan Sentul	$2,6830 \text{ Km}^2$
g). Kelurahan Ngadirejo	$1,9102 \text{ Km}^2$
3). Kecamatan Sukorejo	$9,9246 \text{ Km}^2$
a). Kelurahan Tlumpu	$1,0153 \text{ Km}^2$
b). Kelurahan Karangsari	$0,8824 \text{ Km}^2$
c). Kelurahan Turi	$0,5086 \text{ Km}^2$
d). Kelurahan Blitar	$1,3321 \text{ Km}^2$
e). Kelurahan Sukorejo	$1,4462 \text{ Km}^2$
f). Kelurahan Pakunden	$2,2620 \text{ Km}^2$
g). Kelurahan Tanjungsari	$2,4581 \text{ Km}^2$



Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Jumlah, Persentase,
dan Kepadatan Tiap Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Sananwetan	12,15	55.620	37	4.578
2.	Kepanjenkidul	10,50	42.803	34	3.315
3.	Sukorejo	9,92	50.411	29	4.801

Sumber : Hasil Pendataan SIAK Dispenduk Capil , Desember 2011

2. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia. Disamping sistem pendidikannya, sarana dan prasarana yang baik, seperti tersedianya sekolah yang memadai serta jumlah guru yang seimbang dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi sangat menentukan kualitas anak didik yang dihasilkan.

Jumlah Taman Kanak-Kanak pada tahun ajaran 2010/2011 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 81 sekolah, dengan 4.425 murid dan Guru sebanyak 406 orang dengan rasio guru murid untuk Sekolah Taman Kanak Kana adalah 1 : 17,90. Kemudian untuk Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2010/2011 mencapai 76 sekolah dengan total murid 17.250 siswa dan guru sebanyak 958 orang. Rasio jumlah guru murid sebesar 1 : 17,60.

Adapun sekolah untuk tingkat menengah pertama baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2010/2011 bertambah 1 sekolah dengan berdirinya SMP Islam Kota Blitar di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan sehingga menjadi 28 sekolah dengan murid sebanyak 10.614 murid dan guru 703 orang. Rasio jumlah guru murid sebesar 1 : 13,40 dan untuk fasilitas pendidikan tingkat SMA bertambah 1 dengan berdirinya SMAN 4 sehingga jumlahnya menjadi 22 sekolah yang seharusnya 23 sekolah, karena berkurang satu setelah tutupnya SMK Kosgoro di wilayah Kepanjenkidul sehingga jumlah sekolah menjadi 22 sekolah. Total jumlah murid yang sekolah di SMA/SMK/MA sebanyak 14.408 Siswa dan guru sebanyak 1.013 orang. Rasio jumlah guru murid sebesar 1 : 13,70.

Sedangkan untuk Perguruan Tinggi di Kota Blitar sebanyak 8 Perguruan Tinggi dengan 4.942 mahasiswa, dimana tren jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas, khususnya universitas yang ada di wilayah Kota Blitar semakin besar.

b. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan angka harapan hidupnya. Oleh karena itu segala upaya terus dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata, selain itu pemerintah juga mengupayakan pelayanan kesehatan gratis bagi mereka yang tidak mampu / kurang beruntung melalui Jamkesmas.

Adapun fasilitas kesehatan di wilayah Kota Blitar, yakni ada 5 Rumah Sakit baik negeri maupun swasta, 3 Puskesmas, 17 Puskesmas Pembantu, 160 Posyandu, 6 Laboratorium Klinik, 7 Balai Pengobatan, 31 Apotik, 9 Optik dan 3 Toko Obat.

3. Kondisi Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dapat dipergunakan dalam penilaian pembangunan ekonomi dan merupakan cerminan potensi



perekonomian suatu wilayah. Nominal PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh sektor-sektor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. Selama kurun waktu tahun 2006-2010, nilai PDRB baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan di Kota Blitar mengalami perkembangan cukup menggembirakan, dimana PDRB atas dasar harga berlaku Kota Blitar pada tahun 2010 mengalami kenaikan 12,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.799.998 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 2.032.245 juta pada tahun 2010.

b. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi Kota Blitar pada tahun 2010 tidak mengalami perubahan yang berarti. Perdagangan, hotel dan restoran tetap memegang kendali. Bahkan pada tahun 2010 dominasinya mencapai 30,64 persen dari total nilai tambah. Letak geografis Kota Blitar yang berada pada dataran rendah dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar menjadikannya sentral perdagangan dari dua daerah tersebut. Adapun sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor jasa dengan kontribusi sebesar 20,32 persen, sedangkan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan memberikan kontribusi terbesar ketiga (12,14 persen) dan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,02 persen, dimana dengan luas yang hanya 32,58 km², Kota Blitar tidak banyak memiliki produk pertanian yang bisa diandalkan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Blitar.

c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional per kapita penduduk merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi di suatu wilayah selama satu tahun. Perkembangan pendapatan perkapita penduduk di Kota Blitar dalam kurun waktu mulai tahun 2006 - 2010 mengalami perkembangan walaupun tidak terlalu besar. Hal tersebut tentu tidak terlepas dan sekaligus sebagai konsekwensi dari perkembangan nilai PDRB yang juga meningkat. Bila dihitung berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2010 pendapatan per kapita masyarakat Kota Blitar sebesar Rp. 14.117.191 per tahun. Pendapatan per kapita tahun 2010 ini naik sebesar 11,94 persen dari pendapatan per kapita tahun 2009.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sebagaimana telah disinggung dimuka tadi, bahwa Kota Blitar menempatkan keberhasilan pembangunan ekonomi sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah karena Visi dan Misi yang diemban adalah Visi dan Misi ekonomi, karenanya pertumbuhan ekonomi ini menempati posisi sangat penting didalam proses pembangunan daerah, selain itu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Blitar tahun 2011 sebesar 6,57 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2010 sebesar 6,32 persen. Sedangkan dibandingkan dengan target pertumbuhan pada awal tahun 2011 mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 6,57 persen.



II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015”

Pada Visi dan Misi Kota Blitar yang merupakan cita-cita masyarakat Kota Blitar yang menginginkan pada tahun 2011 Kota Blitar sudah menjadi salah satu kota yang sejahtera, berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religius dimana dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah sekitar.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar sampai dengan tahun 2015, yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Sesuai dengan arah penetapan sasaran pembangunan Kota Blitar pada tahun 2011-2015, maka ditetapkan strategi Pembangunan daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dimana merupakan metode implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Strategi bersifat manajemen operasional yang didasarkan pada berbagai pertimbangan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun kondisi terakhir daerah dan asumsi perkembangan yang terjadi selama 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar pada tahun 2011 sebagai berikut:

1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peningkatan Mutu Dan Akses Pendidikan.
3. Peningkatan Mutu Dan Akses Kesehatan.
4. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian.
5. Penguatan Ekonomi Kerakyatan.
6. Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Publik.
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

C. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan adalah sebagai pengendali pencapaian keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dan diukur berdasarkan indikator sasaran yang SMART (Specific, measurable, attainable, realistic, timely) yang berarti spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan tepat waktu yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Untuk menjabarkan Misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar.



2. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
5. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan
8. Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif secara terpadu dan partisipatif
9. Meningkatkan pembangunan yang partisipatif
10. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
11. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

D. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASAR PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007

Adapun prioritas program pembangunan daerah beserta sasarannya yang sudah disinkronkan untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
4. Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan
5. Peningkatan pembinaan terhadap kesadaran hukum
6. Peningkatan kualitas lingkungan sosial yang kondusif
7. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan
8. Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui Wajib Belajar 12 tahun.
9. Penerapan kurikulum lokal yang bermuatan budi pekerti dan nilai-nilai keagamaan secara sistematis dan terpadu
10. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan
12. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan
13. Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah.
15. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat
16. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal
17. Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi GPMK
18. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin
19. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
20. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
21. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
22. Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan
23. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
24. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik utamanya di tingkat kelurahan dan kecamatan
25. Peningkatan sistem manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif
26. Peningkatan konservasi lingkungan hidup



III. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

A. Prioritas Urusan Wajib Yang dilaksanakan

1. Pendidikan

Pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan capaian berupa meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang pada akhir tahun 2011 mencapai 155 lembaga. Sedangkan APK PAUD mencapai 69,22%. Kemudian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilakukan penyedian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, penyelenggaraan UAN SD/MI, pengadaan pakaian seragam siswa sekolah dasar berupa tersedianya bahan kain setelan seragam batik dan merah putih untuk siswa SD. Maka menghasilkan capaian berupa menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 120,03%, menaikkan angka kelulusan SD/MI sebesar 100%, menurunkan angka putus sekolah SD/MI hingga sebesar 0,005% atau 8 siswa, meningkatkan rasio guru dengan murid SD/MI sebesar 1 berbanding 17,60.

Pada jenjang SLTP, angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 91,24%, dengan angka kelulusan sebesar 99,82%, angka putus sekolah sebanyak 11 siswa dan rasio guru dengan murid sebesar 1 berbanding 13,40. Dan dalam rangka peningkatan kualitas serta untuk mewadahi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata pada tahun 2011, terdapat 1 (satu) sekolah RSBI SD, 2 RSBI SMP. Dan khusus SMPN 1 juga telah memiliki sertifikat ISO 9011. Sementara untuk sekolah negeri lainnya bertaraf Sekolah Standard Nasional (SSN).

Pada jenjang SLTA, tahun 2011 didirikan SMA Negeri 4 Blitar. Hal ini juga selaras dengan upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar. Pada tahun 2011 ada 4 (empat) sekolah setara SMA yang bersertifikat ISO 9011 yaitu : SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, dan SMAN 1 Blitar. Sedangkan capaian kinerja pada jenjang SLTA antara lain angka partisipasi murni SMA/MA/SMK sebesar 109,24%, angka kelulusan sebesar 99,62%, angka putus sekolah sebanyak 14 siswa dan rasio guru dengan murid sebesar 1 (satu) berbanding 13,80.



Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat sidak pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2011



Untuk mewujudkan keadilan di bidang pendidikan Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan program pendidikan luar biasa dan program pendidikan non formal. Adapun capaian kinerjanya adalah terlaksananya penyekatan ruang kelas SDLB dan terlaksananya porseni dan pramuka PLB yang meliputi 2 (dua) cabang olahraga dan diikuti 110 siswa serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bimbingan teknis peningkatan pengelolaan lembaga, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf melalui kelompok keaksaraan fungsional yang meliputi Kejar Paket A setara SD sejumlah 200 siswa, Kejar Paket B setara SMP 6 siswa, dan Kejar Paket C setara SMU sebanyak 469 siswa. Dengan berbagai program tersebut pencapaian angka melek huruf pada tahun 2011 sebesar 98,05%.

2. Kesehatan

Adapun capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan kesehatan antara yakni, Menurunkan jumlah kasus kematian bayi dibanding tahun 2010 sejumlah 36 kasus kematian, menjadi 28 kasus pada tahun 2011. Demikian juga jumlah kematian balita juga berhasil mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sejumlah 39 kasus kematian balita dari tahun 2011 menjadi 29 kasus kematian bayi dan anak balita, Status gizi buruk di Kota Blitar pada tahun 2011 ditemukan 1 kasus, dimana beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kondisi ekonomi, pola asuh yang salah diakibatkan ibu yang mengalami gangguan jiwa. Kasus gizi buruk ini telah mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk, Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk berhasil mengalami penurunan dari 31,44 jiwa pada tahun 2010 menjadi 6,28 jiwa pada tahun 2011, Capaian Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan imunisasi dasar lengkap bagi balita se-Kota Blitar sebesar 80,95%, Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan sebesar 0,58% dari 95,03% pada tahun 2010 menjadi 95,62% pada tahun 2011, Cakupan jamban sehat pada tahun 2011 sebesar 82,79% dari 1.599 keluarga yang diperiksa sejumlah 1.586 memiliki jamban, dan yang memenuhi kriteria sehat sejumlah 1.313, Kunjungan masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan di sarana kesehatan tingkat I pada tahun 2011 sejumlah 13.232 kunjungan. Dibandingkan dengan jumlah sasaran masyarakat miskin sejumlah 19.620 maka pemanfaatan layanan



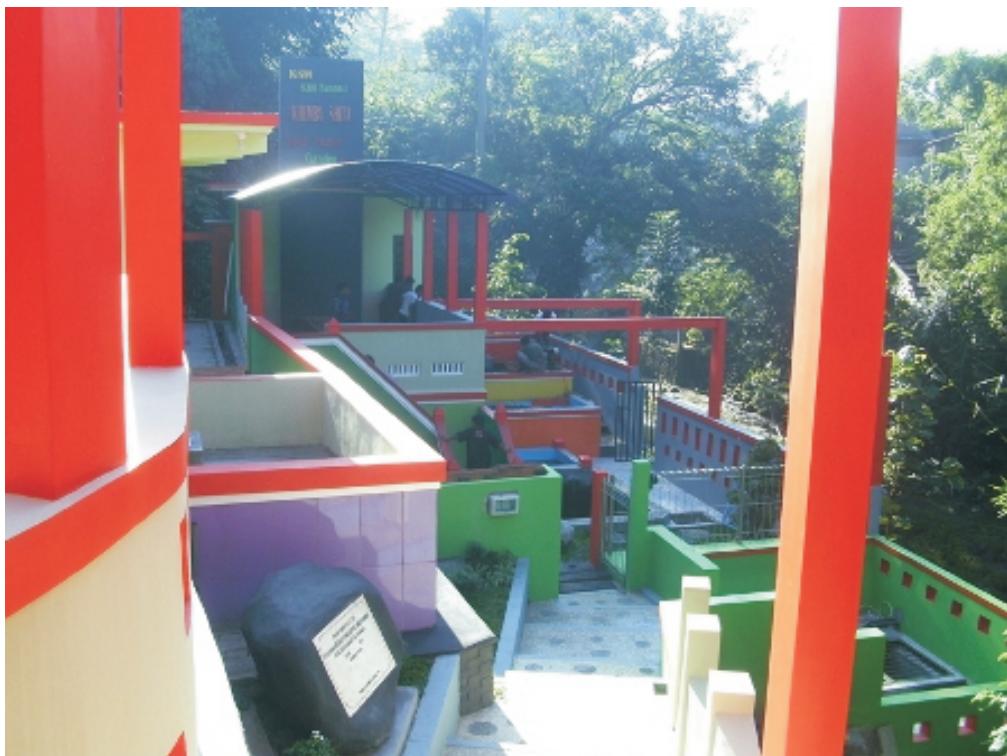
Instalasi Cuci Darah RSD Mardi Waluyo Kota Blitar



sebesar 67,44%. Seluruh masyarakat miskin yang datang di tempat layanan kesehatan telah dilayani 100 %. Kondisi ini juga menunjukkan tidak semua warga miskin pemegang jamkemas, jamkesda dan kartu layanan kesehatan gratis lainnya mengalami kesakitan. Artinya pola hidup menuju sehat telah menjadi pola hidup sebagian masyarakat miskin, Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/bed occupancy rate (bor) tahun 2010 88,60 % tahun 2011 58,56 % (bor standar nasional 85%), Rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (turn over interval / toi) tahun 2010 selama 0,72 hari tahun 2011 selama 2,97 hari, Rata-rata lama perawatan pasien (average length of stay / alos) tahun 2010 selama 3,94 hari, tahun 2011 selama 4,20 hari, Angka kematian bersih (net death rate/ angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit) pada tahun 2010 sebesar 30,8 % tahun 2011 sebesar 34,48 % (kondisi ideal sebesar kurang dari 25 %), Angka kematian kasar (gross death rate/ angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit) tahun 2010 sebesar 57,77 % , tahun 2011 sebesar 77,21 %, Frekuensi pemakaian tempat tidur (bed turn over/bto) pada tahun 2010 sebesar 78,43 kali, tahun 2011 sebesar 50,90 kali, Bor perinatal tercapai sebesar 83,33 % dan adanya pengakuan 16 standar pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan sertifikat komisi akreditasi rumah sakit no : KARS-SERT/134/XI/2011 dengan predikat lulus tingkat lengkap.

3. Lingkungan Hidup

Untuk capaian kinerja urusan lingkungan hidup antara lain : (1) Peningkatan jumlah dokumen UKL-UPL dan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari tahun 2010 sebanyak 146 buah, tahun 2011 menjadi 224 buah, (2) Mampu melaksanakan mengkonservasi mata air sebanyak 3 mata air, (3) Mampu menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik tahun 2011 sebesar 14 %, (4) Meningkatkan rasio pemukiman dengan sanitasi sehat tahun 2011 sebesar 89,84 %, (5) Meningkatkan prosentase sampah terangkut tahun 2011 sebesar 62,45 %, (6) Menangani dan menyelesaikan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hingga tercapai 100 %, (7) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya



IPAL Kumba Shita di Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar



usaha formal untuk yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan hingga tercapai 100 %, dan (8) Perolehan piala adiwiyata tahun ke 2 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada SDK Santa Maria.

4. Pekerjaan Umum

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pekerjaan umum antara lain : (1) Panjang jalan yang ada di Kota Blitar adalah 263.195 (dua ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima) km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 247.965 (dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima) km dan jalan tanah sepanjang 8.353 km. Kondisi jalan yang ada di kota blitar adalah dengan kondisi baik sepanjang 262.695 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) km, kondisi sedang sepanjang 500 km dan kondisi rusak sepanjang 0 km sehingga rasio jalan dalam kondisi baik pada tahun 2011 adalah sebesar 99.8%. (2) Jumlah jembatan yang ada di kota blitar adalah sebanyak 93 buah, dengan kondisi baik sebanyak 79 buah dan kondisi sedang sebanyak 14 buah, sehingga rasio jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2011 adalah sebesar 84.9%. (3) Sampai dengan tahun 2011 saluran irigasi tersier sepanjang 42.035 meter sedangkan untuk saluran irigasi kwater sepanjang 27.056 meter.



Tampak Jalan Aspal di Kota Blitar yang sudah sangat baik

5. Penataan Ruang

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan penataan ruang antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Sampai dengan tahun 2011 pedoman tata ruang telah terstandardkan dan berbentuk Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. (2) Finalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merencanakan pembagian wilayah Kota Blitar menjadi 4 Batas Wilayah Kota (BWK).



6. Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Tersusunnya evaluasi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015 untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Timur nomor : 050/1.149/202.5/2011 tanggal 29 Maret 2011. RPJMD Kota Blitar ditetapkan dengan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015 pada tanggal 29 November 2010. (2) Terselenggaranya evaluasi RPJMD dengan berpedoman pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan (3) Tersusunnya dokumen daerah RKPD

7. Perumahan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan perumahan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan perumahan baru meliputi pemasangan penerangan jalan umum, pemasangan pipa air bersih dan konstruksi fisik berupa septic tank komunal. (2) Meningkatnya pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal hingga mencapai sejumlah 535 (lima ratus tiga puluh lima) unit rumah. (3) Penetapan program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan (4) Hibah untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berupa hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

8. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Melalui pembinaan secara intensif saat ini telah terbentuk sebanyak 25



GOR Soekarno Hatta sebagai salah satu tempat berolah raga di Kota Blitar



organisasi Karang Taruna. (2) Pada tahun 2011 Kota Blitar mencatat beberapa prestasi yang cukup baik. Hal ini terlihat antara lain dalam even Senam Indonesia Raya, SKJ, dan sepak takraw pelajar tingkat Provinsi Jawa Timur mampu meraih juara I dan II. Demikian pula pada cabang olah raga lainnya, selengkapnya dapat dilihat pada buku induk LKPJ Walikota Blitar akhir tahun 2011, dan (3) Untuk menunjang prestasi para atlet olah raga, Pemerintah Kota Blitar telah memfasilitasi dengan sarana olah raga yang cukup memadai. Dimana sampai dengan tahun 2011, di Kota Blitar sudah memiliki sarana olah raga yang berstandar Nasional antara lain GOR Supriyadi, GOR Soekarno Hatta dan Gelanggang Kebonrojo.

9. Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan penanaman modal antara lain sebagai berikut : (1) Sampai dengan tahun 2011 telah terdapat SKPD perijinan satu pintu yang dalam pelaksanaan pelayanannya didasari dengan landasan hukum berupa Peraturan Walikota Blitar nomor : 23 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2010 tentang Jenis dan Mekanisme Perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Blitar. (2) Jumlah perijinan yang dapat dilayani sebanyak 19 jenis ijin utama dan 11 jenis bagian dari ijin utama.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan koperasi dan ukm antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pembaruan data UMKM untuk disesuaikan dengan kondisi terkini di 21 Kelurahan. (2) Pembinaan dan penertiban koperasi yang diikuti dengan penilaian kinerja koperasi serta pemberian apresiasi bagi perkembangan perkoperasian yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi sehingga terwujud koperasi yang berkualitas yang memegang teguh prinsip dan jati diri koperasi. (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen usaha koperasi serta fasilitasi permodalan bagi koperasi berimplikasi pada peningkatan prosentase koperasi aktif di kota blitar sebesar 70,22%. Jumlah koperasi di kota blitar tahun 2011 sebanyak 305 unit, dan (4) Peningkatan sektor perbankan, ditandai dengan banyaknya jumlah perbankan di kota blitar tahun 2011 yaitu sebanyak 20



Secara rutin Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar berikan pembekalan kepada pengurus Koperasi



bank dan jumlah atm sebanyak unit pada 31 lokasi. Hal ini menunjukan sektor usaha di kota blitar mengalami kenaikan.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan kependudukan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. (2) Pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) data penduduk Kota Blitar tahun 2011 yang menghasilkan data sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk yang lahir sebanyak 1.815 jiwa, penduduk yang meninggal sebanyak 1.233 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 2.660 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 1.218 jiwa, sehingga terjadi migrasi netto sebesar 2.024 jiwa sehingga jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir bulan Desember 2011 sebanyak 148.834 jiwa, terdiri dari laki-laki 74.082 jiwa dan perempuan 74.752 jiwa. Keseluruhan penduduk telah memperoleh NIK.
- b. Jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 109.111 jiwa
- c. Jumlah penduduk ber KTP sebanyak 88.853 jiwa
- d. Jumlah penduduk terdaftar KTP Elektronik sebanyak 109.111 jiwa
- e. Cakupan akta kelahiran terhadap jumlah kelahiran sebesar 92,36 %.
- f. Rasio penduduk wajib KTP dengan yang ber KTP NIK sebesar 81,43 %.



Wakil Wali Kota Blitar, H Purnawan Buchori saat mengikuti proses pembuatan KTP Elektronik

12. Ketenagakerjaan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Blitar. Selengkapnya pada buku induk LKPJ Walikota Blitar akhir tahun 2011, dan (2) Fasilitasi kesempatan kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Bursa Kerja Online (BKO) berimplikasi pada penempatan dan perluasan kesempatan kerja baik AKL (Antar Kerja Lokal) maupun AKAN (Antar Kerja Antar Negara) mengalami peningkatan yang signifikan.



13. Urusan Ketahanan Pangan

Capaian kinerja lain dari penyelenggaraan urusan ketahanan pangan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar melalui SK Walikota Blitar nomor : 188/21/HK/422.010.2/2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar yang salah satu tugasnya melakukan kordinasi dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan sistem ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi dan kemanan pangan. (2) Penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) untuk menjamin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam (diversifikasi konsumsi). (3) Menetapkan rumusan angka konsumsi energi dari 9 kelompok pangan yang dikenal dengan istilah Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan pola konsumsi pangan ideal. Secara umum kualitas konsumsi pangan penduduk kota blitar tahun 2011 sebesar 1.693,26 kkal atau 84,6% dari kecukupan yang dianjurkan (akg energi 2.000 kkal). Adapun hasil perhitungan skor pph konsumsi pangan, skor yang dicapai kota blitar tahun 2011 adalah 77,4 meningkat dari tahun 2010 sebesar 72,50 (dari skor maksimum 100). (4) Klasifikasi tingkat konsumsi pangan departemen kesehatan ri tahun 1996, capaian konsumsi energi Kota Blitar tahun 2011 sebesar 84,6% akg berada pada level defisit ringan. (5) Tingkat konsumsi kalori / energi Kota Blitar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka konsumsi energi pada tahun 2011 sebesar 1.693,3 kkal/kapita/th pada tahun 2010 sebesar 1.685,53 kkal/kapita/th (angka kecukupan gizi/akg yang dianjurkan, yaitu 2.000 kkal/kap/hari). Hal ini menggambarkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat kota blitar terhadap makanan bergizi. (6) Secara umum kuantitas penyediaan pangan di Kota Blitar tahun 2011 mengalami surplus. Peningkatan tersebut lebih banyak pada buah-buahan, sayuran dan padi. Peningkatan produktivitas padi per hektar tahun 2011 sebesar 6,92 ton/ha.



Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat mengecek ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Legi

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT terhadap jumlah



keluarga tercapai 0,03 %. (2) Terjadi perbaikan kondisi bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indikator ini ditunjukkan oleh : jumlah perempuan bekerja dalam pemerintahan sebanyak 2.230 orang atau sebesar 51, 628 %, jumlah kasus pelecehan seksual sebanyak 11 kasus, jumlah kasus trafficking sebanyak 1 kasus, jumlah usaha wanita sebanyak 26 unit, jumlah organisasi perempuan sebanyak 22 organisasi, jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 1.069 organisasi. (3) Sedangkan pada upaya perlindungan anak, tercapai jumlah tenaga kerja anak tahun 2011 sebanyak 0 (nol) anak, jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 8 kasus, jumlah pendampingan yang dilakukan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 58 kali dan jumlah pemulihkan kondisi psikis/ rehabilitasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 31 kali. (4) Meningkatkan peran 105 orang kader pemberdayaan masyarakat dalam usaha mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak serta kader posyandu yang sampai dengan tahun 2011 sebanyak 603 orang dan aktif pada 160 unit posyandu yang tersebar di seluruh Kota Blitar. (5) Rasio posyandu balita per RW sampai tahun 2011 adalah 160 : 187 atau sebesar 0,85 berbanding 1 sedangkan rasio posyandu balita per Kelurahan sebesar 1 berbanding 7, 62.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut : (1) Menekan pertumbuhan alamiah karena peristiwa kelahiran hingga mencapai angka 732 jiwa atau 0,49% setelah dikurangi peristiwa kematian, yaitu sebesar 1.965 kelahiran (bayi) dikurangi meninggal 1.233 jiwa. (2) Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) hingga mewujudkan jumlah prevalensi peserta KB aktif sebesar 73,71 % berimplikasi pada rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 1,49 jiwa dan meningkatkan rasio jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dibanding jumlah keluarga sebesar 18,82%. (3) Atas pencapaian pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Blitar pada tahun 2011 mendapat predikat terbaik ketiga tingkat Provinsi Jawa Timur.

16. Perhubungan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan perhubungan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan pengendara dibidang pelayanan angkutan jalan. Jumlah kendaraan yang diuji kelaikan mengalami kenaikan sebesar 3,24%, dari 73,63% di tahun 2010 menjadi 76,87% di tahun 2011. (2) Meningkatkan layanan penumpang melalui angkutan umum di terminal Patria Kota Blitar. Pada tahun 2011 jumlah penumpang mencapai 131.526 orang, merupakan hasil pelayanan dari armada bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 21 kendaraan, Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebanyak 115 kendaraan, serta pelayanan dari armada lain maupun angkutan pedesaan sebanyak 124 kendaraan. (3) Meningkatkan jumlah kendaraan yang



Terminal Patria Kota Blitar



melakukan bongkar muat di terminal barang dari 720 kali di tahun 2010 menjadi 1.080 kali di tahun 2011, hal ini berimplikasi pada penurunan jumlah pelanggaran bongkar muat di luar terminal dari 10 kali di tahun 2010 menjadi 7 kali di tahun 2011. (4) Berbagai macam pelanggaran angkutan jalan yang berhasil ditemukan mengalami penurunan di tahun 2011, seperti jumlah pelanggaran trayek dari 15 kali di tahun 2010 menjadi 12 kali di tahun 2011, jumlah pelanggaran muatan dari 17 kali di tahun 2010 menjadi 13 kali di tahun 2011, dan jumlah pelanggaran kelaikan jalan dari 20 kali di tahun 2010 menjadi 16 kali di tahun 2011. (5) Rasio panjang jalan yang diterangi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada akhir tahun 2011 sebesar 30 % yang ditangani Dinas Perhubungan Kota Blitar.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah baik melalui siaran radio, website, spanduk, baliho, media tradisional, forum tatap muka, pemutaran film dan Unit Layanan Pengaduan Dan Informasi Masyarakat (ULPIM). (2) Pemerintah penyebaran informasi juga disampaikan melalui media lain milik masyarakat. Jumlah radio komunikasi di Kota Blitar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 14 buah, diantaranya yang telah berijin atau sedang proses ijin ada 6 buah. Sedangkan jumlah organisasi radio amatir di Kota Blitar sampai dengan tahun 2011 berjumlah 2 organisasi.

18. Urusan Pertanahan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pertanahan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut, yakni meningkatkan kualitas data inventarisasi asset, berupa tanah milik Pemerintah Kota Blitar mencapai 573 bidang yang mana sejumlah 507 bidang tanah telah bersertifikat. Jumlah tanah yang masih dalam proses sertifikat sebanyak 17 bidang dan yang belum dilakukan proses pensertifikatan sebanyak 35 bidang. Diantara 35 bidang yang belum bersertifikat tersebut, belum termasuk tanah hasil pengadaan pada tahun 2011 sebanyak 12 bidang sehingga jumlah keseluruhan bidang tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang belum bersertifikat adalah sejumah 47 bidang tanah.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian kinerja dari penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sehingga jumlah kerusuhan bernuansa SARA pada tahun 2011 sebanyak 0 (nol) kejadian. (2) Menekan jumlah penyalahgunaan narkoba hingga tercapai 4 kejadian. (3) Memfasilitasi terbentuknya forum kebangsaan dan lsm yang berorientasi pada kesatuan bangsa sebanyak 123 lembaga. (4) Meningkatkan prosentase pos kamling aktif tahun 2011 hingga sebanyak 122 atau sebesar 65,2 %. (5) Meningkatkan tingkat waktu tanggap respon daerah layanan hingga tercapai 100% pada tahun 2011 serta cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2011 tercapai 120 %.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian yang diperoleh dari penyelenggaraan urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Blitar adalah : (1) Prosentase SKPD yang menerapkan sakip dengan predikat baik sebesar 75 %. (2) Inspektorat Daerah dapat menindaklanjuti seluruh laporan yang berasal dari masyarakat sebanyak 6 laporan dan menyelesaiannya dengan baik.(3) Berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur. (4) Pemenuhan target pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar Rp. 6.393.405.883,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga ratus empat ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 100,38 % dari target SKB sebesar Rp.6.369.178.025,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dewan ribu dua



puluhan lima rupiah). (5) Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sebesar Rp 47.690.974.775 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tahun 2010 menjadi sebesar rp 52.598.069.707,39 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah koma tiga puluh sembilan sen) atau 10,29 %. (6) Dengan penatausahaan barang milik daerah yang baik melalui pendampingan penyusunan neraca asset, telah mendukung pencapaian penilaian laporan keuangan daerah kota blitar dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (7) Proses penyusunan peraturan walikota tentang pengelolaan barang daerah telah sampai pada tahap akhir. (8) Unit layanan pengaduan masyarakat ada artinya target daerah tahun 2011 sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2011-2015 terpehuhi. (9) Meningkatnya persentase lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter/ISO sebesar 28% dan standar pelayanan publik sebesar 100%. (10) M e n i g k a t n y a persentase SKPD yang mempunyai jaringan IT (LAN/WAN) sebesar 100%. (11) Meningkatnya prosentase aparatur yang berijasah diploma ke atas sebesar 71,63%.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa (Kelurahan) antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Meningkatkan peran aktif terhadap LPMK sebanyak 21 lembaga di 21 kelurahan dapat terpenuhi 100 %. (2) Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bertongtong royong dan dalam proses pembangunan Kota Blitar.

22. Urusan Sosial

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan sosial antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Terpilihnya panti anak mambaul hisan kelurahan pakunden, sebagai 5 besar pada lomba orsos berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur. (2) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui panti sosial remaja terlantar (psrt) di Kota Blitar tahun 2011 dalam peningkatan ketrampilan PMKS. (3) Menurunnya persentase rumah tangga miskin pada tahun 2011 hingga mencapai sebesar 9,92 %.

23. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan budaya antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Semakin lestari dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan festival kesenian di daerah pada tahun 2011 yang dipentaskan sebanyak 3 kali yang terdiri dari festival lentera, festival gunungan dan festival tumpeng. (2) Terjaganya pelestarian budaya dalam upacara adat yang meliputi ruwatan masal, bersih desa dan bedah sumber. (3) Terwujudnya perlindungan kawasan cagar budaya melalui penetapan Keputusan Walikota Blitar nomor 24 tahun 2011 terhadap 10 tempat di Kota Blitar.

24. Urusan Statistik

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan statistik antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Mendokumentasikan data-data statistik meliputi pertumbuhan PDRB tahun 2011 sebesar 6,57 % *** (angka sangat sementara), PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp. 16.596.353,32 *** (angka sangat sementara), rasio pdrb per kapita dibanding kebutuhan hidup minimal pada tahun 2011 sebesar 169,8 *** (angka sangat sementara). (2) Akumulasi dari peningkatan angka-angka statistik tersebut mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2011 sebesar 77,89 *** (angka sangat sementara) dan menempatkan Kota Blitar pada peringkat I (pertama) *** (angka sangat sementara) di Propinsi Jawa Timur.

25. Urusan Kearsipan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan kearsipan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kota Blitar telah memiliki gedung arsip 1 (satu) unit yang berlokasi di jalan Mastrip 83 Kota Blitar dengan luas 157,5 m² dan jumlah SKPD yang memiliki



ruang penyimpanan arsip mencapai 10 % dari keseluruhan SKPD di Pemerintah Kota Blitar. (2) Telah tersedia tenaga kearsiran yang diangkat melalui keputusan walikota di seluruh SKPD Se-Kota Blitar dan Tingkat Kota. (3) Sarana pengolahan dan penyimpanan yang dimiliki meliputi roll o' pack sebanyak 3 unit, rak arsip sebanyak 20 unit, box arsip sebanyak 1300 unit dan mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit. (4) Pelaksanaan program Arsip Masuk Desa (AMD) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus 2009 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI no 8 tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa.

26. Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja lain dari penyelenggaraan urusan perpustakaan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Telah terbentuk embrio perpustakaan daerah yaitu UPTD Pusat Sumber Belajar yang memiliki jumlah koleksi buku sampai dengan tahun 2011 sebanyak 10.237 buku. (2) UPTD Pusat Sumber Belajar telah dikses oleh pengunjung sampai dengan tahun 2011 sebanyak 1.116 orang.

B. Prioritas Urusan Pilihan Yang dilaksanakan

1. Pertanian

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan pertanian antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Mengadakan pengambilan sampel Bahan Asal Hewan (BAH) yang selanjutnya dilaksanakan pengujian di laboratorium. Pengujian sampel yang dilakukan meliputi uji kontaminasi bakteri salmonella sp., uji kandungan formalin dan uji kandungan antibiotika. (2) Mengadakan uji sampel bahan pangan di laboratorium pengujian veteriner balai besar veteriner wates Yogyakarta. (3) Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Blitar selama tahun 2011 berjalan cukup lancar. Realisasi pemotongan hewan di RPH mencapai 5.826 ekor atau 64,75% kapasitas maksimal, meningkat 1,04% dari capaian tahun 2010. (4) Capaian pada RPH sangat memuaskan, yaitu 136,91% dari target. (5) UPTD RPH Kota Blitar meraih prestasi membanggakan, yaitu sebagai unit pelayanan publik berprestasi utama pada penghargaan Abdi Tani untuk unit pelayanan publik berprestasi di bidang pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan sebagai juara II lomba rumah pemotongan hewan yang mampu mewujudkan produk asuh se-Jawa Timur.

2. Perikanan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Perikanan antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Pada tahun 2011 Kota Blitar mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan di bidang perikanan, karena salah satu petani ikan binaan dinas pertanian kota blitar atas nama aris handrianto dengan inovasinya menerapkan kolam terpal dengan filter beton cor telah berhasil meraih juara I lomba inovasi teknologi tingkat Provinsi Jawa timur dan sebagai finalis kategori Greenovation Award dalam anugerah apresiasi Inovasi Indonesia tahun 2011 yang diselenggarakan BPPT RI. (2) Perkembangan produksi ikan hias mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 1.575 ekor dan tahun 2011 sebesar 2. 910 ekor. (3) Meningkatnya perkembangan produksi benih ikan dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 76.850 ekor menjadi sebanyak 85.410 ekor tahun 2011.

3. Pariwisata

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pariwisata antara lain dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Meningkatnya jumlah wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tahun 2011 yaitu sejumlah 505.318 orang atau mengalami peningkatan sebesar 14,8 % dibandingkan jumlah tahun 2010. (2) Rata-rata lama inap wisatawan meningkat dibanding tahun sebelumnya selama 1,3 hari menjadi 1,4 hari. Hal ini menunjukkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sudah mulai betah tinggal di Kota Blitar yang disebabkan oleh adanya peningkatan pelayanan baik pelayanan infrastruktur penunjang pariwisata yang disediakan Pemerintah Kota Blitar, penataan dan pengembangan kawasan wisata, maupun peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku wisata lainnya yang dalam hal ini oleh para pemilik hotel dan restoran. (3) Meningkatnya



kapasitas kamar hotel pada tahun 2011 menjadi sebanyak 718 kamar, demikian pula jumlah restoran/rumah makan meningkat menjadi sebanyak 50 buah.

4. Industri

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Perindustrian antara lain : (1) Nilai pertumbuhan industri Kota Blitar selama tahun 2011 sebesar 0,25% , yang berarti lebih kecil dari tahun 2010 yang sebesar 1,98%. Hal ini disebabkan oleh berhenti beroperasinya sejumlah cabang industri makanan, minuman dan tembakau akibat pembaruan peraturan pemerintah yang mengatur industri rokok. Sedangkan tumbuhnya cabang industri sandang dan kulit diantaranya kerajinan batik, industri sepatu dan sandal, serta tumbuhnya industri penjahitan akibat pengaruh kebijakan daerah yang memaksimalkan potensi penjahitan dengan memberikan tender jasa penjahitan seragam sekolah kepada industri kecil penjahitan di Kota Blitar juga turut memberikan andil terhadap nilai pertumbuhan industri di Kota Blitar. (2) Secara keseluruhan jumlah unit usaha baik industri formal maupun industri nonformal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana untuk industri formal pada tahun 2010 sejumlah 117 unit berkembang menjadi 118 unit sedangkan industri nonformal sebanyak 1.888 unit berkembang menjadi 1.893 unit pada tahun 2011. (3) Peningkatan jumlah industri dan pertumbuhan yang positif mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Pertumbuhan daya serap industri pada tenaga kerja terampil di Kota Blitar sebesar 0,89 % di tahun 2011.



KENDANG SENTUL : Salah satu hasil Industri Kerajinan di Kota Blitar

5. Perdagangan

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain : (1) Sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Blitar no.10 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, maka upaya pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dilakukan agar dapat berkembang dengan lebih baik, tertata rapi, dan dapat menjadi jaring pengaman perekonomian bagi masyarakat. Data menunjukkan tren positif pada pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar, dimana pada tahun 2010 ada 1.027 pedagang menjadi 1.150 pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 11,98%. (2) Perkembangan sarana dan prasarana perdagangan tahun 2010-2011 mengalami perkembangan namun cukup kecil ditunjukan dari jumlah pasar tradisional pada tahun 2010 sebanyak 6 buah dan tahun 2011 sebanyak 6 buah , jumlah pasar hewan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 1 buah dan jumlah pasar swalayan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 4 buah, jumlah toko pada tahun 2010 sebanyak 227 buah dan tahun 2011 sebanyak 229 buah dan beberapa usaha kecil menengah lainnya.



IV. PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN

Tahun anggaran 2011 Kota Blitar mendapatkan alokasi dana yang berasal dari pelaksanaan tugas-tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi mencapai Rp. 17.315.881.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi mencapai Rp. 16.159.868.750,00 (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 93,32% yang secara operasional pelaksanaannya melekat pada tugas pokok dan fungsi pada 4 (empat) Dinas Teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar dan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, dengan perincian masing Dinas Teknis tersebut sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar

Tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2011 adalah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berasal dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 416.156.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), dimana tugas pembantuan ini Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Perwakilan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0030/068-01.2.01/15/2011 tanggal 20 Desember 2010.

Dana tugas pembantuan tersebut diarahkan pada Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB yang diaplikasikan pada 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari : (1) Kegiatan Keikutsertaan ber-KB; (2) KKB (Klinik KB) yang melayani sesuai SOP; (3) Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; (4) Advokasi dan Penggerakan; (5) Kerjasama dengan Mitra Kerja; (6) Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan; (7) SDM yang terdidik dan terlatih; (8) Dukungan Manajemen Pembinaan dan Monitoring Evaluasi, dimana telah terealisasi sebesar Rp. 418.751.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 100,62%.



Pelayanan Program KB yang selalu disosialisasikan langsung kepada masyarakat



2. Dinas Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar selama tahun 2011 menerima alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dari Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 Nomor : DIPA No.0941/024-03.4.01/15/2011 tanggal 4 Maret 2011. Dana tugas pembantuan diwujudkan dalam Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diaplikasikan pada : (a) Bantuan Operasional Kesehatan, (b) Pelaporan dan Pencatatan, (c) Perencanaan BOK, (d) Monitoring dan Evaluasi, dan (e) Sosialisasi/ Pembinaan, yang terealisasi sebesar Rp. 227.479.750,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 90,09%.



Dinas Kesehatan Kota Blitar secara rutin memberikan penambahan gizi anak di Kota Blitar

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tahun 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar mendapatkan dana tugas pembantuan dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp. 647.225.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 No. 0362/026-04.01/15/2011 tanggal 20 Desember 2010. Dana tugas pembantuan diwujudkan dalam Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui 2 (dua) kegiatan yakni : (1) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dan (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif yang telah terealisasi sebesar Rp. 635.740.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 98,23%.

4. Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Blitar

Selama Tahun 2011 Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo menerima alokasi dana Tugas Pembantuan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp.16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyard Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0948/024-04.4.01/15/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Dana tugas pembantuan ini diarahkan pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang diaplikasikan pada 2 (dua) kegiatan yakni : (1) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, dan (2) Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya yang terealisasi sebesar Rp. 14.877.898.000,00 (Empat Belas Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 92,99%.



V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas penyelenggaran pemerintahan dan percepatan pembangunan suatu daerah lebih banyak dipengaruhi oleh seberapa besar penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dikelola daerah tersebut dapat berjalan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kota Blitar pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar daerah telah dilaksanakan nota kesepakatan, perjanjian bersama maupun operasional kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan saling menguntungkan antara Kota Blitar dengan daerah yang lain. Hal tersebut direalisasikan dalam kegiatan antara lain :

- a. Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikukuhkan dengan Kesepakatan Bersama nomor : 1120.1/57/012/2009 dan Nomor 19 A Tahun 2009. Kerjasama ini meliputi seluruh bidang pembangunan dengan kewajiban untuk menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dalam pelaksanaan kerjasama teknis.
- b. Kerjasama pembangunan sanitasi masyarakat dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia berupa NPHH antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Blitar untuk kegiatan Water and Sanitation Program, Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D) Nomor : NPPH-080/PK/2010 yang berlaku sampai dengan tahun 2012. Kerjasama ini berupa pembangunan sanitasi pada 8 titik lokasi yang ada di Kota Blitar
- c. Kerjasama AKKOPSI yang tertuang dalam Surat Nomor : 02/KU.AKKOPSI/2010 perihal SK Pembentukan Tim Pengarah AKKOPSI. Kegiatannya berupa tukar menukar informasi tentang pembangunan sanitasi dengan Pemerintah Kota dan kabupaten se Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi.
- d. Kerjasama Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Bengkulu terutama yang berkaitan dengan Haul Bung Karno dan Haul Ibu Fatmawati.
- e. Kerjasama Penyusunan RTRW Perbatasan antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar berupa FDG yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Blitar dan Kabupaten Blitar pada tahun 2009. Kerjasama tersebut difasilitasi Provinsi Jawa Timur berupa kerjasama pada 6 bidang yaitu : drainase, persampahan, air bersih, pariwisata, transportasi dan lingkungan hidup.
- f. Kerjasama APEKSI dengan Pemerintah Kota se-Indonesia berupa peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan musyawarah komisariat wilayah

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga didasarkan pada Pasal 195 ayat (3), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang menyatakan bahwa daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Blitar adalah:



- a. Meningkatkan dukungan dari pihak ketiga dalam mengoptimalkan kapasitas Pemerintah Daerah,
- b. Meningkatkan pelayanan publik, dan
- c. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga antara lain :

- a. Kerjasama Layanan Online Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) antara Pemerintah Kota Blitar melalui BKD Kota Blitar dan PT. Telkom Indonesia, Tbk. dengan perjanjian nomor : KTEL.16/HK.850/DES-0204000/2011. Sasaran dari kerjasama ini berupa implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang bersifat nasional.
- b. Kerjasama dengan CV. INDRACO - Pasuruan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Water Park Sumber Udel. Perjanjian sewa atas kawasan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2012. Selama masa perjanjian ini, Pemerintah Kota Blitar dapat melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah.

Kebijakan yang diambil adalah: (a) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah,(b) meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan (c) melibatkan instansi vertikal dalam setiap kegiatan yang terkait. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota dan instansi Vertikal meliputi bidang kegiatan :

- a. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dimana Pemerintah Kota Blitar melalui Bakesbangpolinmas melaksanakan kerjasama bidang keamanan lingkungan dengan Polresta Blitar, Kodim 0808 dan Yonif 511. Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan sasaran masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tenram. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengefektifkan koordinasi yang mantap.
- b. Penegakan dan Penindakan Hukum, dimana dalam upaya pelaksanaan penegakan dan penindakan hukum di wilayah Kota Blitar maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Blitar melibatkan Kantor Kejaksaan dan Kantor Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang mewakili pemerintah Pusat di Daerah dalam hal tersebut.
- c. Pertanahan, yakni kerjasama dibidang pertanahan dilakukan dengan Kantor Pertanahan Nasional. Kerjasama ini dipandang sangat penting karena sekalipun urusan kewenangan pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetapi secara riil tidak seluruh urusan yang didesentralisasikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu maka menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Nasional Kota Blitar menjadi pilihan utama dalam penyelenggaraan urusan bidang pertanahan.
- d. Keagamaan, dimana peran serta Pemerintah Kota Blitar di bidang keagamaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat adalah dengan memfasilitasi dan ikut mensukseskan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar juga memberikan pembinaan kepada Guru Ngaji, P3N dan Lembaga Sosial Keagamaan lainnya melalui pemberian insentif dan Bingkisan Idul Fitri maupun pada saat Natal. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga memberikan bantuan untuk pelaksanaan Kegiatan Lembaga Sosial Keagamaan baik Muslim maupun Non Muslim.
- e. Perstatistikian, dimana di bidang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga yang memang bertugas untuk menyediakan data baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal ini



dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data sehingga lembaga ini perlu untuk menyamakan informasi baik di pusat maupun daerah. Dalam rangka menjaga konsistensi data, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam hal penyediaan data untuk beberapa kegiatan diantaranya adalah Sensus Ekonomi, Pembuatan Daerah dalam Angka, Penyusunan Harga Dasar Komoditi maupun Barang di Kota Blitar serta Penyusunan PDRB.

D. Pembinaan Batas-batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan surat Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 Perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar Daerah, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Sebagai wujud penegasan dari batas Wilayah di Kota Blitar adalah dengan menggunakan batas alam yang berupa sungai dan menggunakan bentuk bangunan fisik yang berupa jalan maupun saluran air. Selain itu sebagai tanda agar mudah untuk dimengerti pada jalan yang memasuki Kota Blitar juga telah dibangun Tugu Batas kota yaitu yang terdapat diperbatasan :

- a. Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul yang berbatasan dengan Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- b. Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- c. Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
- d. Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan yang berbatasan dengan Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- e. Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan yang berbatasan dengan Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- f. Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan yang berbatasan dengan Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
- g. Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo yang berbatasan dengan Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
- h. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo yang berbatasan dengan Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Secara umum penegasan batas wilayah Kota Blitar dengan daerah sekitarnya tidak ada permasalahan yang fundamental, karena selama ini pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten Blitar yang merupakan wilayah perbatasan secara keseluruhan dengan wilayah Kota Blitar. Bahkan dampak yang terjadi adalah hal yang positif diantara kedua wilayah, sehingga mampu menumbuhkembangkan kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah baik dilihat dari segi sosial, budaya maupun peningkatan perekonomian

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang tahun 2011, di wilayah Kota Blitar terjadi bencana kebakaran sebanyak duabelas kali dengan tidak mengakibatkan korban jiwa. Adapun lokasi dan waktu terjadinya kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran pohon beringin di Aloon-aloon Kota Blitar pada tanggal 1 Januari 2011;
- b. Kebakaran pohon Mahoni di Jl. Mastrip Kota Blitar pada tanggal 25 Februari 2011;
- c. Kebakaran rumah di Jl. Bali No. 116 Karangtengah pada tanggal 8 Maret 2011;
- d. Kebakaran di Gardu Induk PLN pada tanggal 10 Mei 2011;
- e. Kebakaran rumah di Jl. Dr. Wahidin Kepanjen Lor pada tanggal 26 Mei 2011;
- f. Kebakaran rumah di Jl. Mayang Selatan pada tanggal 5 Agustus 2011;



- g. Kebakaran rumah di Jl. Sulawesi Lingk. Cabean Plosokerep pada tanggal 19 September 2011;
- h. Kebakaran rumah di Jl. Imam Bonjol Sananwetan pada tanggal 22 Oktober 2011;
- i. Kebakaran Travo Listrik di SMKN 3 Jl. Diponegoro pada tanggal 7 November 2011;
- j. Kebakaran rumah di Jl. Semeru Kauman pada tanggal 7 November 2011;
- k. Kebakaran rumah di Lingk. Ngrebo Gedog pada tanggal 17 November 2011;
- l. Kebakaran rumah di Jl. Diponegoro Sananwetan pada tanggal 26 Desember 2011.



TANGGAP : Tampak PMK Kota Blitar saat menangani Kebakaran di Kota Blitar

Langkah-langkah penanggulangan bencana kebakaran dilakukan dengan penggerahan 4 (empat unit) kendaraan operasional Pemadam Kebakaran dan 24 (dua puluh empat) petugas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar, sehingga dalam waktu 1 (satu) jam obyek/lokasi kebakaran bisa dipadamkan. Selain Kebakaran tersebut diatas, pada tahun 2011 tidak terjadi bencana yang berarti di wilayah Kota Blitar. Namun kewaspadaan terhadap bencana tetap harus dijaga, mengingat letak Kota Blitar secara geografis dekat dengan Gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud dengan jarak + 40 km. Selain itu adanya perubahan iklim global yang dapat menyebabkan banyak peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, juga patut untuk diwaspadai.

Meletusnya sebuah gunung berapi tidak dapat diprediksi dalam jangka panjang, namun hanya dapat diprediksi dalam jangka pendek dengan memperhatikan gejala alam yang terjadi di sekitar lokasi gunung berapi. Sehingga hal ini menuntut Pemerintah Kota Blitar untuk selalu menjaga kewaspadaan apabila terjadi peristiwa alam di sekitar Gunung Kelud yang mengarah pada kemungkinan terjadinya letusan. Identifikasi kemungkinan terjadinya bencana yang dilakukan berdasarkan data, perubahan alam dan siklus sejarah yang pernah terjadi di Kota Blitar disamping ancaman gunung meletus adalah penyakit. Oleh sebab itu, upaya preventif sebagai upaya pencegahan menjadi sangat penting dan terus ditingkatkan. Tidak semata-mata terbatas sebagai bagian dari tupoksi dinas kesehatan dan rumah sakit, namun sudah diarahkan ke semua lini baik ditingkat SKPD maupun lingkungan masyarakat melalui RT/RW, Dasa Wisma, PKK dan sebagainya di Kelurahan.



Berdasarkan potensi yang ada baik dari sisi masyarakat maupun anggarannya, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Blitar selama Tahun 2011 diarahkan kepada :

- a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang tidak memicu terjadinya peristiwa alam dalam bentuk bencana.
- b. Perumusan dan implementasi langkah antisipatif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.
- c. Perkuatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- d. Membuat Master Plan Mitigasi Bencana.

Sementara dari sisi anggaran, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan dengan mengalokasikan kemungkinan kebutuhan belanja pada bantuan sosial, belanja tak terduga, dan upaya-upaya pencegahan serta latihan penanggulangan sebagai program SKPD terkait terutama melalui keberadaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Blitar atau dapat disingkat menjadi Satlak PBP Kota Blitar merupakan bentuk dari tindakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang tiba-tiba dan untuk memaksimalkan pengelolaan dan penanganan pengungsi secara terencana, terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Satlak PBP Kota Blitar dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 188/8/422.010.2/ 2007 yang juga memiliki Unit Operasional PBP di tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kelurahan terdapat Regu Satlinmas PBP.

Sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan disusunlah prosedur tetap (Protap) Satlak PBP, peta rawan bencana, peta rencana evakuasi dan lokasi evakuasi. Dengan dibentuknya Satlak PBP ini bukan berarti bahwa setiap penanggulangan bencana akan menjadi tanggung jawab Satuan ini, namun peranan dari seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar tetap diikutsertakan dalam penanggulangannya dibawah koordinasi Bakesbang Pol Linmas. Selain itu keikutsertaan dari unsur swasta diantaranya PMI, ORARI, SAR Djaladri dan TAGANA tidak dapat diabaikan demi mewujudkan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terpadu antara pemerintah dan masyarakat.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Suatu daerah atau wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan khusus ditetapkan apabila wilayah dalam propinsi dan / atau kabupaten/kota yang ditetapkan tersebut dalam penyelenggaraan



Makam Bung Karno sebagai salah satu Kawasan Khusus di Kota Blitar



fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud kawasan khusus merupakan kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi pemerintahan tertentu untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan fungsi pemerintahan tertentu selain perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut uraian dan pengertian mengenai kawasan khusus diatas, hingga saat ini di Kota Blitar masih belum memiliki kawasan tertentu yang masuk kategori sebagai kawasan khusus. Meskipun secara fisik sebenarnya kawasan Makam Bung Karno sudah layak untuk dijadikan sebagai kawasan khusus di Kota Blitar, karena secara budaya cukup jelas bahwa Bung Karno Sang Proklamator adalah Bapak Bangsa sekaligus Founding Father dan sudah diakui oleh bangsa Indonesia bahkan luar negeri atas jas-jasanya. Didukung pula oleh penempatan satu-satunya UPT Perpustakaan Nasional di kawasan Makam Bung Karno tersebut. Untuk itu kedepan perlu kita pikirkan bersama mengenai kemungkinan untuk mengusulkan kawasan Makam Bung Karno tersebut sebagai Kawasan Khusus di Kota Blitar, sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kunjungan pariwisata daerah sebagai dukungan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di tingkat nasional.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang diidamkan oleh seluruh masyarakat baik secara pribadi maupun bersama-sama. Masyarakat yang aman, tenram, dan tertib merupakan kondisi masyarakat yang patuh dan taat terhadap aturan perundangan yang ada, persamaan hukum, dan rendahnya kriminalitas dan kejahatan serta dukungan / partisipasi masyarakat dalam terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Demikian pula ada jaminan dan perlindungan dari adanya bencana alam maupun ulah manusia bagi masyarakat. Adapun uraian tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme,dll), dimana Ketentraman dan ketertiban umum juga didukung kegiatan penertiban dan penegakan hukum daerah yang dilakukan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terwujud dalam bentuk pengamanan dan pengawalan dan penyidikan dan penindakan, operasi yustisi, dan penertiban umum. Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota bertujuan untuk mengatur kehidupan Kota Blitar secara tertib dan aman. Oleh karena itu peraturan perundangan daerah harus dikawal dalam implementasinya agar dapat menciptakan kondisi masyarakat tertib dan aman. Pelanggaran terhadap peraturan daerah dan ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2011 sebanyak 912 kasus pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran PKL sebanyak 69 kasus, reklame 660, kesulitan/PSK sebanyak 2, dan pelanggaran lain (pemerasan, perampukan, pembunuhan, makanan dan minuman ilegal) sebanyak 28 pelanggaran. Adapun gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum sebanyak 140 kasus yang terdiri atas 12 kejadian kebakaran, 27 kejadian demonstrasi dan 101 gangguan lain (Anjal, Gepeng, Pasangan selingkuh, Cafe/lesehan dan penyandang masalah kerawanan sosial lainnya). Dari sebanyak 33 demonstrasi yang terjadi di Kota Blitar, hanya 2 demonstrasi yang mengarah ke Pemerintah Kota Blitar, sedangkan 31 demonstrasi lainnya mengarah ke Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi lainnya.
2. Pada tahun 2011, di Kota Blitar tidak terjadi kerusuhan yang benuansa SARA dimana secara target daerah ditetapkan 0 kejadian. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Blitar Tahun 2011 sebanyak 867 kasus dengan jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang terselesaikan di Kota Blitar Tahun 2011 sebanyak 862 kasus. Sehingga Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Blitar Tahun 2011 adalah 99,4% dimana Target Nasional sebesar 70 % pada tahun 2010, dimana ini merupakan tugas lintas sektoral, yakni Badan Kesbangpol Limas, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan serta Kelurahan se Kota Blitar.



VI. PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat maka pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun laporan. Tujuan dari penyusunan laporan adalah sebagai keterangan, laporan dan informasi atas pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan 26 urusan wajib, 5 urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Keseluruhan penyelenggaraan urusan tersebut merupakan satu kesatuan dari rencana mewujudkan Visi Kota Blitar yakni "MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015"

Beberapa kebijakan, program, kegiatan telah berhasil dan dirasakan oleh masyarakat hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai indeks Pembangunan Manusia (IPM) . Angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur mencatat IPM Kota Blitar mencapai 77,89 pada tahun 2011. Nilai tersebut menempatkan posisi IPM Kota Blitar pada peringkat 1 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar dan masyarakat mendapat apresiasi baik di tingkat Nasional maupun provinsi serta lembaga Pemerhati Pemerintahan antara lain Piala Education Award Widya Karya Nugraha atas Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan peningkatan pendidikan, Piala Adipura Kategori Kota Sedang, Piala Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD Award) sebagai Juara Umum Tata Kelola Terbaik dan Terbaik dalam kategori Infrastruktur Ekonomi Daerah, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Piala Adiwiyata yang diraih SDK Santa Maria serta berbagai prestasi di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya.

Untuk itu kedepan diperlukan konsistensi dan komitmen semua pihak, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi serta misi Kota Blitar, terutama pada upaya-upaya : Peningkatan kualitas pendidikan, Peningkatan kualitas kesehatan, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Diversifikasi dan Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas sarana prasarana publik dan lingkungan hidup. Menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan yang tiada terhingga kepada para anggota DPRD Kota Blitar yang terhormat maupun masyarakat Kota Blitar serta Bapak Gubernur Jawa Timur, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar akhir tahun anggaran 2011 ini dapat memberikan kejelasan dan bermanfaat. Dan dengan semboyan "Rukun Agawe Santoso " mari kita bersama bahu membahu berusaha sekuat tenaga untuk kelancaran pembangunan daerah kedepan dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberi petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Blitar menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Amin



VISI :

**"MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG BERKEADILAN
BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015"**

MISI :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan.
 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Merata.
4. Memantapkan Pelaksanaan Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif Berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.